

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Jogiyanto, (2007). Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Jogjakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset, Yogyakarta.

Sukmadinata, Nana S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Rosdakarya

### JURNAL

Dewi, E. P. (2018). GOOD GOVERNANCE DAN TRANSPARANSI RENCANA STRATEGI TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH. JURNAL LENTERA BISNIS, 7(2), 81-108.

Dewi, N. I. S., Edy Sujana, S. E., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan pada Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud (Studi pada Pemerintah Kabupaten Badung). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), 86-101.

Juliastuti, A. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, 1(1).

Lalombombuida, Y., Lengkong, F., & Londa, V. (2018). Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(57).

Munir, M. (2015). Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Publika*, 3(4).

Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem E Procurement. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(2).

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Tahir, A. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, 16(3).

Wahyubroto, A. M. W. (2017). Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Kota Gresik. *Agora*, 5(2).

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.

Wijaya, W. H., Indriyani, R., & Putri, Y. E. (2009). Studi Penerapan E-Procurement Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *Penelitian Mandiri, ITS Surabaya*.

Wijaya, W. H., Indriyani, R., & Putri, Y. E. (2009). Studi Penerapan E-Procurement Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *Penelitian Mandiri, ITS Surabaya*.

## Internet

Ais. ( 29 September 2016). Pegiat Anti Korupsi di Bantul Minta Semua Proyek di Bantul Disidk Dewan. <http://jogja.tribunnews.com/>. Diakses pada tanggal 13 November 2018, Pukul 17.31 WIB.

Candra, S. (2016, Maret 17). Perkembangan e-Procurement di Indonesia. Retrieved september 19, 2016, from Binus University: <http://sbm.binus.ac.id/2016/03/17/perkembangan-e-procurement-di-indonesia/>. Diakes pada tanggal 5 November 2018, Pukul 17.35 WIB.

Fahreza, R. (10 Desember 2018). JK: Birokrasi Lambat & Berbelit-belit Picu Korupsi. <https://news.okezone.com>. Diakses pada 13 November 2018, pukul 17.35 WIB.

<http://sp.beritasatu.com/home/kejari-bantul-temukan-indikasi-mark-up-proyek-jalan-usaha-tani/107892>. Diakes pada tanggal 13 November 2018, Pukul 17.40 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>. Diakses pada Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 20.00 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/pm3hfi430/keprihatinan-atas-capaian-indeks-persepsi-korupsi-indonesia>. Diakses pada Tanggal 26 April 2019. Pukul 15.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/252316/birokrasi-indonesia-terburuk-kedua-di-asia>. Diakses pada tanggal 26 April 2019. Pukul 23.30 WIB.

Sidik, H. (2017, 27 Februari). Bantul Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Rp494,5 miliar. [Jogja.antaranews.com](http://Jogja.antaranews.com). diakses pada tanggal 4 November 2018, Pukul 16.30 WIB.

## Undang-Undang

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 4 Tahun 2017 Tahu Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia